

MENGANTAR INDONESIA MENUJU 'JALUR PEMBANGUNAN BARU'ⁱ

*'Dengan dukungan masyarakat global, Indonesia memiliki jendela kesempatan untuk bergeser menuju model pembangunan yang tidak intensif-karbon. Tanpa tindakan dini, Indonesia bisa terjebak dalam model pertumbuhan [...] yang tidak berkelanjutan pada lingkungan kita dan dunia.'*ⁱⁱ

DNPI, Agustus 2010

Pada September 2010, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mempresentasikan 'kurva biaya pengurangan gas rumah kaca' Indonesia, yang digambarkan sebagai 'rencana pembangunan hijau' bagi negeri ini.ⁱⁱⁱ Tujuannya adalah untuk 'memastikan dukungan pengurangan emisi karbon agar tidak mengorbankan tujuan-tujuan pembangunan nasional dan usaha jangka panjang untuk memperbaiki standar kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia'.^{iv}

Dalam salah satu laporan DNPI tercatat: 'Sementara konsensus global mengakui ketidakpastian skenario mana yang akan terjadi, resiko yang mungkin ada terlalu besar bila tidak dilakukannya tindakan penanggulangan perubahan iklim yang serentak dan terkoordinasi secara global. [...] Walaupun jika semua negara maju mengurangi emisi mereka ke tingkat emisi tahun 1990 (sebagaimana target Protokol Kyoto), hal itu tidak akan cukup untuk mengatasi perubahan iklim serius [...]. Indonesia mengerti keadaan terjepit ini dan memutuskan untuk melakukan tindakan.'^v

Indonesia melakukan usaha keras untuk meninggalkan model industri ekspansi yang dimotori oleh deforestasi menuju pembangunan yang bernilai tinggi dan berdampak rendah. Tiga propinsi telah memiliki 'strategi pertumbuhan hijau', dengan mengidentifikasi bagaimana untuk 'bergerak menuju kegiatan dengan nilai tambah lebih tinggi dan sektor rendah karbon sehingga pertumbuhan di masa depan meninggalkan jejak karbon yang lebih kecil.'^{vi}

Agendanya jelas: strategi untuk mengurangi emisi yang terkait dengan sektor bubur kertas dan minyak kelapa sawit dilakukan melalui peningkatan produktivitas dalam wilayah-wilayah perkebunan yang telah ada, dengan ekspansi tambahan dibatasi pada lahan dengan nilai karbon dan konservasi rendah.

Secara definisi, ini tidak termasuk wilayah hutan, lahan gambut, habitat spesies liar dan wilayah-wilayah yang merupakan sumber kehidupan masyarakat lokal.

Mengatasi pendorong deforestasi

Misi Greenpeace adalah untuk membela alam dan mempromosikan perdamaian. Greenpeace berkomitmen untuk menghentikan perubahan iklim. Kami bekerja untuk melindungi hutan alam dunia yang tersisa serta tumbuhan, hewan dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.

Kami menantang pemerintah dan industri untuk menghentikan peran mereka dalam penghancuran hutan dan perubahan iklim.

Deforestasi bertanggungjawab bagi sekitar seperlima emisi gas rumah kaca (GRK) dunia.^{vii}

Menghentikan deforestasi harus menjadi inti strategi global untuk menghentikan perubahan iklim, karena potensinya sebagai penyumbang terbesar pengurangan emisi GRK secara cepat.

Brazil dan Indonesia adalah dua sumber terbesar emisi yang terkait deforestasi.^{viii} Presiden kedua negara telah bersumpah untuk membuat pemotongan emisi secara drastis.^{ix}

Sumber terbesar tunggal di Brazil adalah deforestasi Amazon,^x dan ini termasuk dalam pendorong utamanya adalah perkebunan kedelai^{xi} dan peternakan sapi potong.^{xii} Dalam empat tahun terakhir, Greenpeace telah menginisiasi kesepakatan-kesepakatan industri untuk menghentikan peran mereka dalam mendorong hilangnya hutan Amazon.^{xiii}

DNPI mengidentifikasi sektor-sektor bubur kertas dan minyak kelapa sawit sebagai pendorong utama hilangnya hutan alam dan degradasi lahan gambut.^{xiv} Selama empat tahun terakhir, Greenpeace telah menyoroti ekspansi pesat kedua sektor ini dalam hutan dan lahan gambut yang kaya karbon dan habitat kritis kehidupan.^{xv}

Walaupun kedua sektor ini mengklaim bahwa mereka berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan,^{xvi} saat ini operasi kedua sektor ini dicirikan dengan pengelolaan yang lemah^{xvii} – dengan gablangnya pelanggaran peraturan perijinan, analisis dampak lingkungan dan perlindungan lahan gambut dalam serta pengelolaan lahan yang lemah.

Misalnya, sebagaimana hasil studi DNPI untuk wilayah Kalimantan Timur, kedua sektor telah diberikan wilayah konsesi yang sangat luas, sebagian besar telah dibuka wilayah hutan alamnya dan telah ditanami kembali dengan hasil minyak kelapa sawit dan serat yang sedikit dibandingkan hutan aslinya.^{xviii}

Moratorium memberikan kesempatan untuk mengembangkan visi bersama pembangunan rendah karbon

Sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia-Norwegia yang berhilai \$1 milyar, Indonesia mengumumkan moratorium selama dua tahun untuk semua 'konsesi baru untuk konversi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan'.^{xix}

Pada September 2010 laporan DNPI dan pemerintah daerah Kalimantan Timur berpendapat bahwa moratorium adalah kesempatan untuk 'mempercepat'^{xx} usaha-usaha peningkatan laju produktivitas dalam perkebunan yang telah ada dan menggeser pembangunan ke lahan bernilai konservasi rendah di luar hutan alam atau lahan gambut.

Misalnya, hasil studi ini mencatat bahwa pengurangan signifikan dalam emisi tahunan 'dapat dicapai dengan pertama-tama membuat rencana jelas untuk minyak kelapa sawit dalam hal produksi minyak kelapa sawit kasar (CPO, crude palm oil) dan bukan dengan jumlah hektar wilayah yang ditanami dan menggunakan peningkatan rendemen produktivitas sebagai pengganti ekspansi konsesi. Selanjutnya, kita bisa mengurangi karbon dari deforestasi. Pilihan kita pertama adalah menggunakan lahan yang telah terdegradasi untuk konsesi baru dan menukar konsesi yang memiliki tutupan hutan.'^{xxi}

Tantangan moratorium adalah menyatakan target produktivitas dan mendefinisikan lahan dengan nilai konservasi rendah

Greenpeace, bersama koalisi besar LSM dan perusahaan menyerukan perlindungan segera semua lahan gambut dan penghentian sementara (moratorium) semua pembukaan hutan alam dalam wilayah-wilayah konsesi baru dan lama.

Moratorium semacam ini akan menciptakan insentif bagi industri untuk meningkatkan produktivitas secara dramatis dalam wilayah-wilayah perkebunan yang ada.^{xxii}

Pada saat yang sama hal ini akan menciptakan insentif bagi industri untuk menggunakan lahan yang telah dibuka untuk pengembangan selanjutnya.^{xxiii} Misalnya, DNPI dan pemerintah daerah Kalimantan Timur telah mengidentifikasi lebih dari tiga perempat lahan dalam konsesi HTI bahan bubuk kertas telah terdegradasi, tidak ditanami dan tidak produktif;^{xxiv} ini menunjukkan bahwa terdapat wilayah sangat luas yang telah ditebangin yang dapat dipergunakan oleh industri.

Secara kritis, moratorium dapat memberikan Pemerintah Indonesia dengan jendela yang diperlukan untuk memperbaharui proses alokasi untuk memastikan perlindungan nilai-nilai ekologis, keanekaragaman hayati, sosial dan hukum.

Nah, inilah yang dinamai 'jalur pembangunan baru'.^{xxv}

Oktober 2010

ⁱ Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010 'Strategi Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Kalimantan Timur' September 2010: 8

ⁱⁱ DNPI (2010) 'Kurva biaya pengurangan gas rumahkaca Indonesia' Agustus 2010 Bagian 1: 5

ⁱⁱⁱ DNPI (2010b) 'Memahat jalur pembangunan hijau bagi Indonesia': 2

^{iv} DNPI (2010): 4

^v DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010) 7

^{vi} DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010) 7

^{vii} United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2007) 'Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers', IPCC Figure SPM.1 www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmssp-b.html

^{viii} Menurut perkiraan terbaru yang dipublikasikan oleh pemerintah Brazil dan Indonesia, dimana kedua negara merupakan penyumbang sekitar 4–5% emisi GRK pada tahun 2005. Sumber: Kementerian Sains dan Teknologi Brazil (MCT) (2009) 'Inventário Brasileiro das emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa, Informações gerais e valores preliminares

(30 novembro de 2009)', Kementerian Sains dan Teknologi 30 November 2009 www.mct.gov.br/upd_blob/0207/207624.pdf dan DNPI (2010) yang memberikan total emisi sebesar 2.055GtCO₂e pada 2005

^{ix} Pemerintah Brazil (2008) 'Ringkasan Eksekutif: rencana nasional mengenai perubahan iklim: Brazil' www.mma.gov.br/estruturas/imprensa/arquivos/96_11122008040728.pdf dan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai perubahan iklim pada pertemuan G-20 tahun 2009 <http://redd-indonesia.org/publikasi/detail/read/indonesia-presidents-speech-on-climate-change-at-2009-g-20-meeting-1/>

^x MCT (2009)

^{xi} USDA (2004). The Amazon: Brazil's Final Soybean Frontier. Production Estimates and Crop Assessment Division Foreign Agricultural Service. 13 January 2004 www.fas.usda.gov/pecad/highlights/2004/01/amazon/amazon_soybeans.htm

^{xii} Chomitz, KM and Thomas TS (2001) 'Geographic patterns of land use and land intensity' <http://en.scientificcommons.org/523737>: 14 mengatribusikan sampai dengan 90% pada pembukaan padang rumput dan lahan terlantar' Grieg-Gran, M (2006) 'The cost of avoiding deforestation, Report prepared for the Stern Review of the Economics of Climate Change' International Institute for Environment and Development, October 2006: 13 diekstrapolasi dari angka-angka dalam Chomitz/World Bank dimana 77% lahan deforestasi dari padang rumput + ~10% dan lahan terlantar; Presidência da República (2004). 'Plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal': 10 www.planalto.gov.br/casacivil/desmat.pdf states that cattle is responsible for 80% of deforested land in the Amazon region; and Barreto P, R Pereira, E Arima (2008) 'A pecuária e o desmatamento na Amazônia na era das mudanças climáticas' Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia: 20 www.imazon.org.br/novo2008/arquivosdb/120849pecuaria_mudancas_climaticas.pdf mengutip Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2006b) 'Produção agrícola municipal' www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?t=2&z=t&o=10&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1 menyimpulkan bahwa 75-81% lahan deforestasi sampai dengan 2005 telah ditempati oleh ternak sapi.

^{xiii} ABIOVE (2009) Soy moratorium, new challenges mark the renewal of the business sector-NGO partnership, 28 July 2009 http://www.abiove.com.br/english/informa_us.html; Marfrig (2009). Institutional presentation, November 2009 www.mzweb.com.br/marfrig/web/arquivos/Marfrig_Apresentacao_Institucional_20091116_eng.pdf p14; Greenpeace (2009) 'Global cattle giants unite to ban Amazon destruction'. 5 October 2009 www.greenpeace.org/international/en/news/features/global-cattle-giants-unite051009/; JBS (2009) JBS and sustainability, notice to the market. 24 September 2009 http://jbs.riweb.com.br/JBS/Show.aspx?id_materia=ZXFGu6is/FgmeJNL34moQA==&id_canal=2dKvBqcLTgMRVOletZQE1w==

^{xiv} misalnya DNPI (2010) Bagian 1:16, 18, 19, 20

^{xv} Greenpeace International (2007) 'How the palm oil industry is cooking the climate' Greenpeace International, November 2007 www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/cookingthe-climate-full.pdf

Greenpeace International (2008a) 'How Unilever's palm oil suppliers are burning up Borneo' Greenpeace International, April 2008 <http://www.greenpeace.org/international/press/reports/how-unilever-palm-oil-supplier>

Greenpeace International (2008b) 'The Hidden Carbon Liability of Indonesian Palm Oil', Greenpeace International, May 2008 <http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/hidden-carbon-liability-of-palm-oil/Greenpeace> UK (2009) 'Illegal forest clearance and RSPO greenwash: case study of Sinar Mas' Greenpeace UK, December 2009 www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/forests/sinarmasRSPOgreenwash.pdf

Greenpeace International (2010a) 'Caught red handed: How Nestlé's use of palm oil is having a devastating impact on rainforest, the climate and orang-utans', Greenpeace International, March 2010 <http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/caught-red-handed-how-nestle/>

Greenpeace International (2010b) 'New evidence Sinar Mas: rainforest and peat land destruction' Greenpeace International, April 2010 www.greenpeace.org/raw/content/usa/press-center/reports4/new-evidence-of-sinar-mas-rai.pdf

Greenpeace International (2010c) 'How Sinar Mas is pulping the planet' Greenpeace International, July 2010 www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2010/Sinar-Mas-Pulping-The-Planet.pdf

Greenpeace International (2010c) 'How Sinar Mas is expanding empires of destruction' Greenpeace International July 2010 <http://www.greenpeace.org/international/sinar-mas-empires-of-destruction>

^{xvi} Misalnya, PT SMART Tbk (2010) 'INDEPENDENT VERIFICATION REVEALS GREENPEACE CLAIMS ARE EXAGGERATED OR WRONG' Jakarta, 29 July 2010 http://www.goldenagri.com.sg/newsroom_verification.php; Aida Greenbury (2010) 'Sustainability and Beyond – Challenges for the Next Decade 2010' Asia Pulp & Paper Presentation to RISI, 12 March 2010: 13

^{xvii} Lihat berbagai laporan Greenpeace yang dikutip di atas. Lihat juga BSI-CUC (2010) ‘Verifying Greenpeace Claims Case: PT SMART Tbk’ 10 August 2010 www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/IVEX%20Report%20100810.pdf ; DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 42 yang menyatakan bahwa ‘Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan penerapan kebijakan dan perubahan secara penuh. Saat ini, setidaknya 60 konsesi kelapa sawit dalam propinsi ini beroperasi tanpa perijinan lengkap.’; RSPO 22 September 2010 surat kepada PT SMART, GAR dan PT Ivo Mas Tunngal dapat dilihat di <http://www.greenpeace.org.uk/blog/forests/sinar-mas-gets-ultimatum-rspo-over-palm-oil-and-deforestation-20100923>

^{xviii} Misalnya: ‘Perkebunan kertas Kalimantan Timur menutupi wilayah sekitar 800.000 ha, sebagian besarnya dibuka pada tahun 1990an. Seiring dengan peraturan lingkungan saat ini, kurang lebih 160.000 ha harus disisihkan untuk konservasi alam (misalnya, proteksi resapan air dan koridor satwa liar) sementara wilayah sisanya dapat dipergunakan untuk peruntukan ekonomis. Secara teoritis, 640.000 ha dapan menghasilkan volume tahunan sekitar 23 juta meter kubik, 17 lebih dari cukup untuk menyuplai industri produk kehutanan. Walau demikian, saat ini hanya 165.000 ha yang nyatanya ditanami, sementara wilayah sisanya dibiarkan terbengkalai dan rusak. Produktivitas rendah, dan laju penanaman yang rendah artinya panen tahunan Kalimantan Timur hanya 0,7 juta meter kubik.’ Sumber: DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 17; lihat juga halaman-halaman 38-39 untuk produktivitas minyak kelapa sawit

^{xix} Pemerintah Norwegia (2010) ‘Norwegia dan Indonesia dalam kerjasama pengurangan emisi dari deforestasi’, siaran pers Pemerintah Norwegia, 26 Mei 2010

www.regjeringen.no/en/dep/smk/press-center/Press-releases/2010/Norway-and-Indonesia-in-partnership-to-reduce-emissions-from-deforestation.html?id=605709

^{xx} DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 38

^{xxi} DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 33

^{xxii} ‘Memberi insentif investasi pada perkebunan kayu yang ada untuk meningkatkan hasil menuju tingkat dalam perkebunan Sumatra terbaik’ Sumber: DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 27

‘Dalam hal pengurangan, peningkatan hasil dapat memungkinkan penggunaan wilayah perkebunan yang lebih sempit untuk mencapai target CPO yang sama.’ Sumber: DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 37

‘Investasi manufaktur hilir tidak dapat berjalan di depan investasi sumber kayu tersertifikasi dan berkelanjutan, apakah dari perkebunan baru atau lahan terdegradasi atau sebagai hasil produktivitas lebih baik dari perkebunan yang ada.’ Sumber: DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 55

^{xxiii} ‘Kalimantan Timur memiliki wilayah lahan yang telah rusak berat karena deforestasi di masa lalu, degradasi hutan dan kebakaran besar pada tahun 1980an dan 1990an. Sebanyak 1,4 juta ha dikategorikan sebagai *sangat kritis* dan *kritis*, dengan tutupan pohon tersisa masing-masing sebanyak kurang dari 10 persen dan 30 persen. Sebagian besar lahan kritis dan sangat kritis tertutup alang-alang (*Imperata cylindrical*) dan spesies semak lainnya sebagai vegetasi utama dengan nilai karbon rendah’ Sumber: DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 36

‘Peningkatan penggunaan lahan rusak saja dapat menghindari deforestasi seluas 250.000 ha.’ Sumber: DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 38

^{xxiv} DNPI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010): 17

^{xxv} Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2010 ‘Strategi Pembangunan Berkelanjutan Kalimantan Timur’ September 2010: 8